



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I DIREKTORAT IKAN AIR LAUT TAHUN 2026



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Laut, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Laut. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 19 April 2026

Direktur Ikan Air Laut



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Ikhsan Kamil, S.T., M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Maksud dan Tujuan	11
1.3. Tugas dan Fungsi.....	11
a. Sumber Daya Manusia	13
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	13
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	15
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Budidaya	16
2.2. Sasaran Kegiatan	16
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2026	16
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja Ikan Air Laut	22
SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	23
IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional UPT .	23
IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT	25
IKSK 3. Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT	27
IKSK 4. Produksi Benih Kepiting di UPT	29
IKSK 5. Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT	31
IKSK 6. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	33
IKSK 7. Benih Kepiting Yang Disalurkan ke Masyarakat	35
IKSK 8. Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	37
IKSK 9. Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT	36
IKSK 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun	41
IKSK 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	43
IKSK 12. Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR Yang Diuji	46
IKSK 13. Kawasan Budi Daya Lobster Yang Dibangun Atau Direvitalisasi	49

IKSK 14. Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB, CPIB).....	50
IKSK 15. Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya	52
SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.....	54
IKSK 16. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut	54
IKSK 17. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut	57
IKSK 18. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut	59
IKSK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut.....	64
IKSK 20. Persentase Layanan Perkantoran	65
IKSK 21. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP	67
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	69
BAB IV. PENUTUP	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut	12
Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang Pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026	13
Gambar 3. Potensi Perikanan Budi Daya.....	14
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025	19
Gambar 5. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026	20
Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2025	70

D A F T A R T A B E L

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sarana Budi Daya Ikan Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat	21
Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT	23
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut Untuk Operasional pada tiap UPT	24
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Calon Induk Unggul Kepiting untuk Operasional UPT .	26
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT	27
Tabel 6. Realisasi Produksi Benih Ikan Air Laut Kepiting di UPT Tahun 2026	28
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Kepiting di UPT	30
Tabel 8. Realisasi Produksi Benih Kepiting di UPT Tahun 2026	30
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT	31
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat .	33
Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan ke Masyarakat	34
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Benih Kepiting yang Disalurkan ke Masyarakat	36
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan	37
Tabel 14. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan I Tahun 2026	38
Tabel 15. Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel)” Berdasarkan Ruang Lingkup Triwulan I Tahun 2026	39
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Monitoring Produksi Pakan Alami UPT	40
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun	42
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji	44
Tabel 19. Capaian Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji di UPT DJPB Triwulan I Tahun 2026	45
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang Diuji	47
Tabel 21. Rincian Target dan Realisasi Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Triwulan I Tahun 2026 di 4 UPT-DJPB	48
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Lobster Yang Dibangun atau Direvitalisasi	49

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB, CPIB)	51
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya	53
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut	55
Tabel 26. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2026	56
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut	58
Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut..	63
Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut	64
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran	66
Tabel 31. Kegiatan Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026	66
Tabel 32. Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP	68

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Tahun 2026, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut.

Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026:

- a) Terdapat 6 (enam) Indikator kinerja dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang capaiannya telah melampaui target triwulan yang ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut, dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu: (i) produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT (ekor), (ii) produksi benih ikan air laut di UPT (ekor) (iii) benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor), (iv) sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel), (v) sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji (sampel) (vi) sampel surveillance AMU/AMR yang diuji (sampel).

- b) Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (i) monitoring produksi pakan alami di UPT dan (ii) presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker direktorat ikan air laut (Persen).

SK2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu: (i) persentase layanan perkantoran (Persen).

- c) Terdapat 1 (satu) indikator kinerja dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang capaiannya kurang dari target triwulan yang telah ditetapkan, yaitu:

SK1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (i) benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 28,57% Indikator Kinerja telah melampaui dan mencapai target triwulan yang ditetapkan dan 14,28% Indikator Kinerja yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori “**BAIK**” dengan nilai **108,42**. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT (Ekor)**, telah diproduksi calon induk unggul ikan air laut di UPT sebanyak 530 ekor di BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok;
2. **IKU 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT (Ekor)**, belum ada capaian untuk produksi calon induk unggul kepiting di UPT BBPBAP Jepara;
3. **IKU 3. Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT (Ekor)**, telah diproduksi benih ikan air laut dan kepiting di UPT sebanyak 135.286 ekor di BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, BPBL Ambon dan BPIU2K Karangasem
4. **IKU 4. Produksi Benih Kepiting di UPT (Ekor)**, belum ada capaian untuk produksi benih kepiting di UPT BBPBAP Jepara;
5. **IKU 5. Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT**, belum ada capaian untuk produksi ikan konsumsi air laut di UPT BPBAP Situbondo;
6. **IKU 6. Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih ikan air laut sebanyak 686.500 ekor oleh beberapa UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu: BBPBL Lampung, BPBAP Ujung Batee, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPIU2K Karangasem, BPBAP Takalar dan BPBL Batam;
7. **IKU 7. Benih Kepiting Yang Disalurkan Ke Masyarakat (Ekor)**, telah disalurkan ke masyarakat benih kepiting sebanyak 100.000 ekor oleh BPBAP Takalar;
8. **IKU 8. Sampel Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)**, telah dilakukan pelayanan pengujian parameter penyakit ikan air laut sebanyak 667 sampel di beberapa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok;
9. **IKU 9. Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT (Laporan)**, telah dibuat laporan monitoring produksi pakan alami di UPT sebanyak 1 laporan;
10. **IKU 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut yang Disusun (Rekomendasi Kebijakan)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja kebijakan tata Kelola bidang budi daya ikan air laut.
11. **IKU 11. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel parameter penyakit ikan air laut sebanyak 113 sampel di BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPBL Ambon;
12. **IKU 12. Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR Yang Diuji (Sampel)**, telah dilakukan pengujian sampel monitoring Survailan AMR sebanyak 72 sampel di beberapa laboratorium UPT Ditjen Perikanan Budi Daya, yaitu di: BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Lombok dan BPBL Batam;
13. **IKU 13. Kawasan Budi Daya Lobster yang Dibangun atau Direvitalisasi (Unit)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi.

14. **IKU. 14 Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB, CPIB) (Unit)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut;
15. **IKU 15. Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya;
16. **IKM 16. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut (Persen)**, telah dilakukan upaya penyelesaian terhadap temuan dan saran dari LHP Itjen oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut pada periode triwulan I Tahun 2026 sehingga mendapatkan capaian presentase rekomendasi hasil pengawasan sebesar 88,24%;
17. **IKM 17. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut;
18. **IKM 18. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)** belum ada capaian untuk indikator kinerja penilaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut;
19. **IKM 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut;
20. **IKM 20. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)**, telah dilaksanakan penilaian layanan perkantoran di Direktorat Ikan Air Laut dan mendapatkan nilai persentase sebesar 100%;
21. **IKM 21. Persentase Penyelesaian penyusunan SOP (Persen)**, belum ada capaian untuk indikator kinerja persentase penyelesaian penyusunan SOP di Direktorat Ikan Air Laut.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan target kinerja tahun 2026, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Maksud dan Tujuan

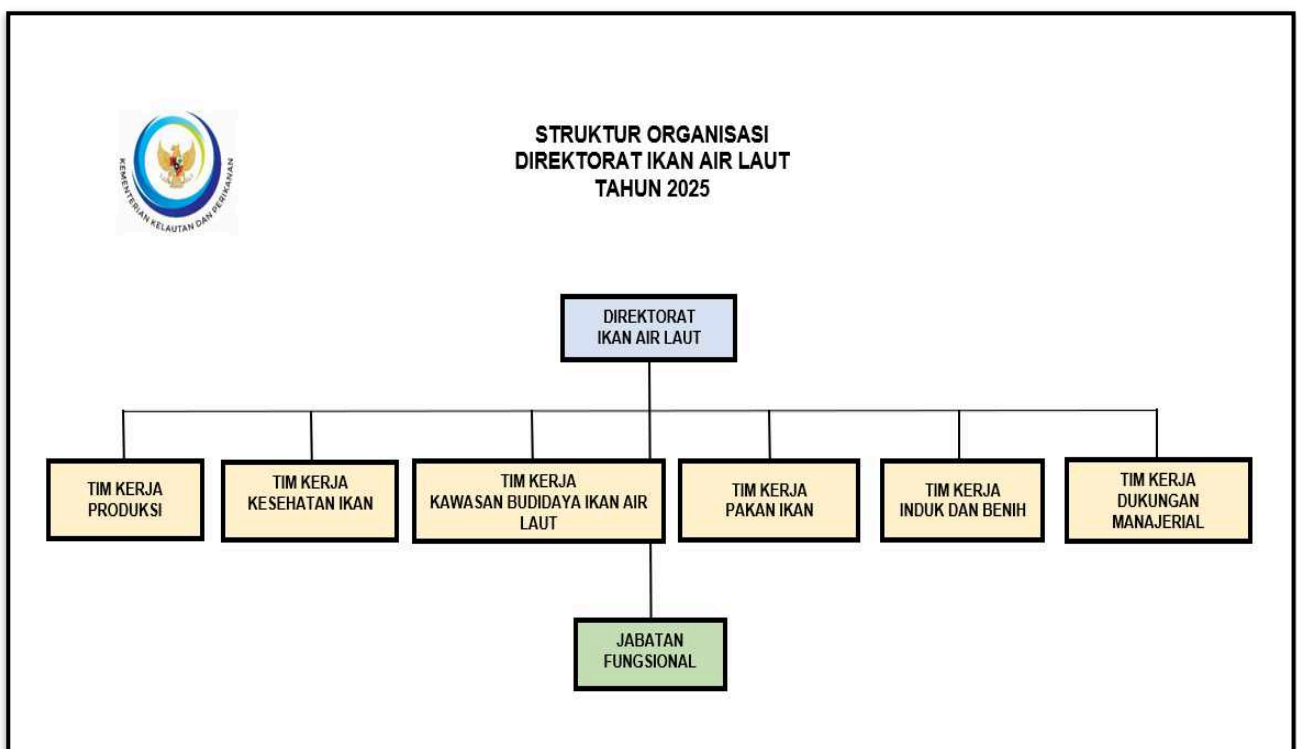
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Laut selama tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tugas Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

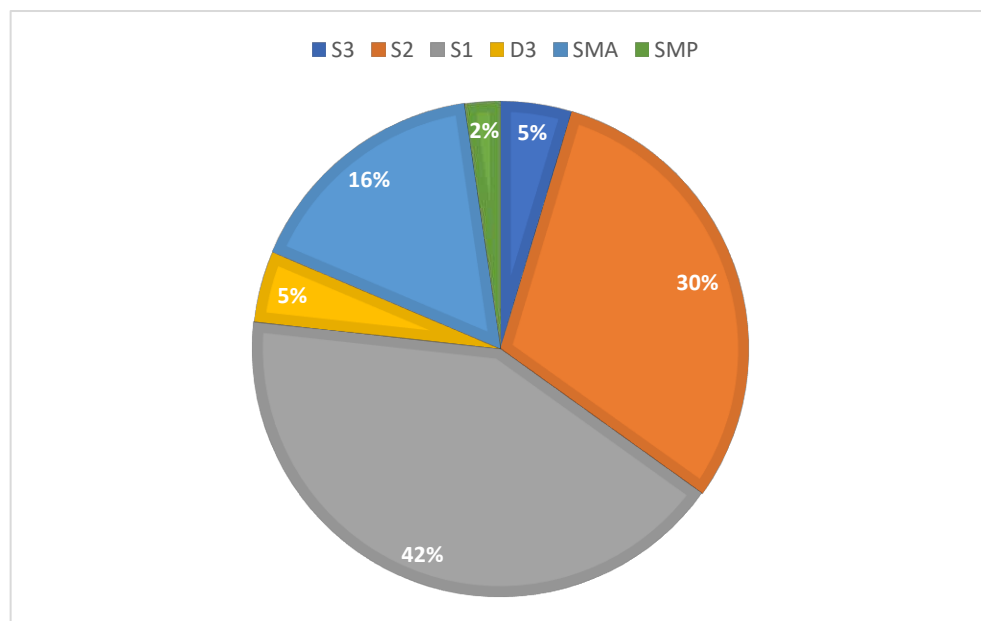
- 1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan Kawasan pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah dan pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan pada komoditas ikan air laut; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 5%, S2 sebanyak 30%, S1 sebanyak 42%, D3 sebanyak 5%, SMA sebanyak 16% dan SMP sebanyak 2%.



Gambar 2. Keragaan SDM berdasarkan jenjang pendidikan di Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026

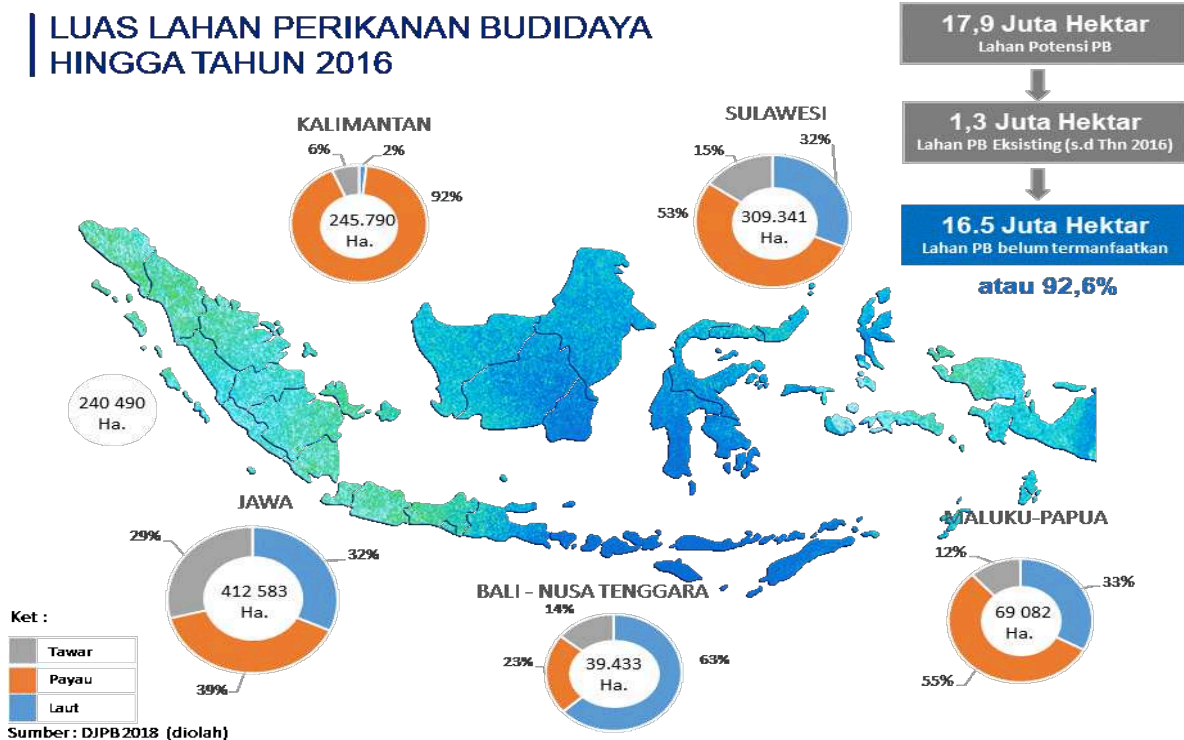
Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Ikan Air Laut mencapai 42 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil 31 orang,
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 7 orang dan
- PPPK Paruh Waktu 2 orang.

b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat

terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



Gambar 3. Potensi Perikanan Budi daya

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut 2026 selama kurun waktu Januari - Maret 2026.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Ikan Air Laut triwulan I tahun 2026. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 telah diterbitkan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan; (3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; (4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Terkait dengan program pembangunan perikanan budi daya, KKP memiliki beberapa rencana kegiatan antara lain produksi benih dan induk unggul, produksi pakan ikan, pembinaan sertifikasi subsektor pembudidayaan ikan, monitoring residu, penyakit ikan, dan pemantauan resistensi anti mikroba, pengembangan budidaya komoditas unggulan berbasis klaster, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan benih dan calon induk ikan, pengelolaan irigasi tambak partisipati (PITAP). Klaster Kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, dan Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture (IISAP).

2.2. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Laut telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2026. Sasaran Kegiatan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 adalah Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut.

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Kamil
Jabatan : Direktur Ikan Air Laut
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tb. Haeru Rahayu
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1. Produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT (ekor)	5.612
		2. Produksi calon induk unggul kepiting di UPT (ekor)	5.747
		3. Produksi benih ikan air laut di UPT (ekor)	773.771
		4. Produksi benih kepiting di UPT (ekor)	341.622
		5. Produksi ikan konsumsi air laut di UPT (kg)	25.000
		6. Benih ikan air laut yang disalurkan ke Masyarakat (ekor)	4.560.469
		7. Benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	448.658
		8. Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	1.842
		9. Monitoring produksi pakan alami di UPT (laporan)	4
		10. Kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut yang disusun (rekomendasi kebijakan)	3
		11. Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji (sampel)	340
		12. Sampel monitoring surveillance AMU/AMR yang diuji (sampel)	216
		13. Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi (unit)	1
		14. Unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB, CBIB) (unit)	200
		15. Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya (orang)	500
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut (persen)	86
		17. Penilaian mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (nilai)	84,2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut (indeks)	81,5
		19. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut (nilai)	81
		20. Persentase layanan perkantoran (persen)	100
		21. Persentase penyelesaian penyusunan SOP (persen)	100

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	403.744.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	183.142.000
Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026		586.886.000

Jakarta, 15 Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Direktur Ikan Air Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Tb. Haeru Rahayu



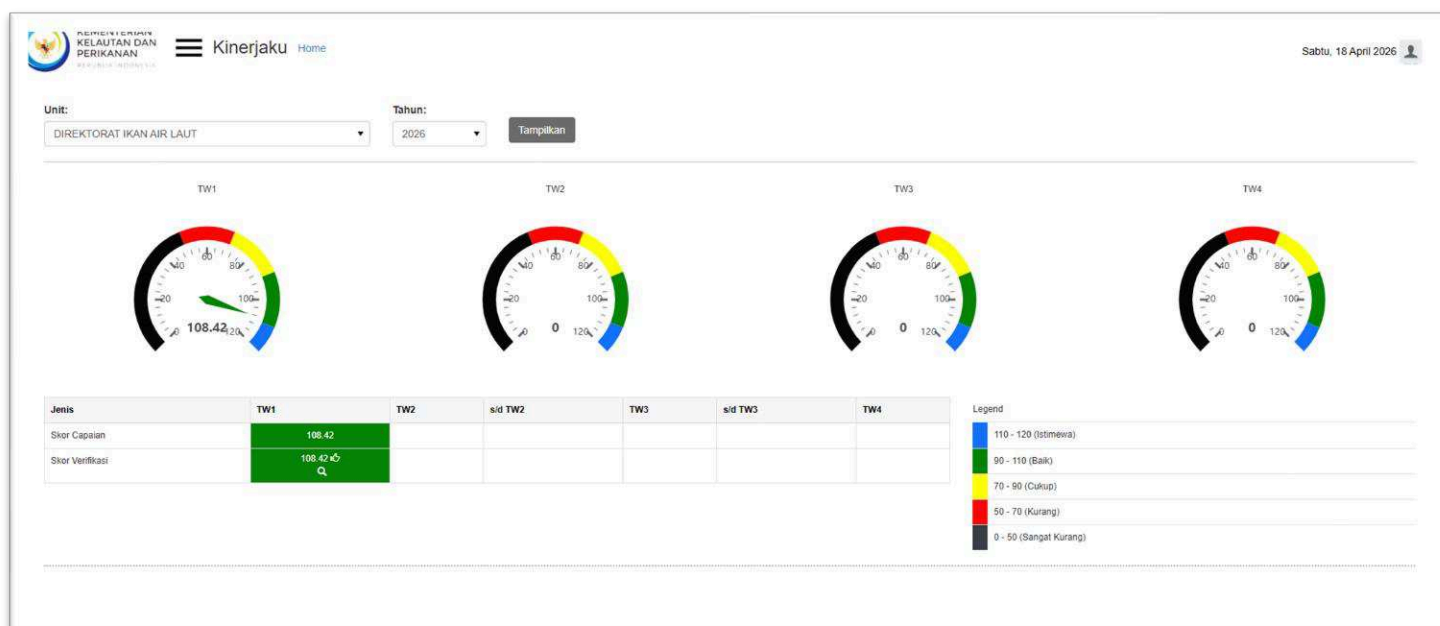
Ditandatangani
Secara Elektronik

Ikhsan Kamil

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 5. Schreenshoot NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Triwulan I Tahun 2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembudidayaan Ikan Air Laut pada tahun 2026 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 6 (enam) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 14 (empat belas) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Periode Pelaporan	Target TW I	Realisasi TW I	%
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	1) Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT (ekor)	5.612	Triwulan	410	530	129,27
		2) Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT (ekor)	5.747	Triwulan	0	0	0,00
		3) Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT (ekor)	773.771	Triwulan	110.500	135.286	122,43
		4) Produksi Benih Kepiting di UPT (ekor)	341.622	Triwulan	0	0	0,00
		5) Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT (Kg)	25.000	Triwulan	0	0	0,00
		6) Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	4.560.469	Triwulan	570.000	686.500	120,44
		7) Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	448.658	Triwulan	112.164	100.000	89,16
		8) Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan (sampel)	1.842	Triwulan	488	667	136,68
		9) Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT (Laporan)	4	Triwulan	1	1	100,00
		10) Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut yang disusun (Rekomendasi Kebijakan)	3	Tahunan	0	0	0,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2026	Periode Pelaporan	Target TW I	Realisasi TW I	%
		11)	Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji (Sampel)	340	Triwulan	75	113	150,67
		12)	Sampel monitoring surveillance AMU/AMR yang diuji (Sampel)	216	Triwulan	53	72	135,85
		13)	Kawasan Budi Daya Lobster yang dibangun atau direvitalisasi (Unit)	1	Tahunan	0	0	0,00
		14)	Unit Usaha yang dilakukan pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya ikan air laut (CBIB dan CPIB) (Unit)	200	Triwulan	0	0	0,00
		15)	Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya (Orang)	500	Tahunan	0	0	0,00
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut	16)	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	86	Triwulan	86	88,24	102,60
		17)	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	84,2	Tahunan	0	0	0,00
		18)	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut (Indeks)	81,5	Semesteran	0	0	0,00
		19)	Nilai pengawasan kearsipan internal Satker Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	81	Tahunan	0	0	0,00
		20)	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	100	Triwulan	100	100	100,00
		21)	Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP (Persen)	100	Tahunan	0	0	0,00

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

SK.01. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut

Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan budi daya yang berkelanjutan. Sasaran Kegiatan ini memiliki 13 Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 1. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT

Salah satu target capaian kinerja yang dikelola oleh Timja Induk dan Benih pada Direktorat Ikan Air Laut yaitu produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT. Metode perhitungan indikator ini berfokus pada posisi akhir yakni jumlah produksi calon induk unggul ikan air laut ukuran minimal 300 gram yang dihasilkan baik untuk internal maupun PNBP oleh Unit Pelaksana Teknis. Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBAP Situbondo, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon.

Target indikator kinerja calon induk unggul ikan air laut di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 5,612 ekor sedangkan untuk target triwulan I yaitu 410 ekor. Target indikator tersebut diukur setiap triwulan pada tahun 2026 sesuai dengan target tiap UPT lingkup DJPB.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
1.850	10.462	5.612	410	530	129,27	9,44

Pada tabel diatas realisasi pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT mencapai 530 ekor dari target Tahunan yakni 5.612 ekor. Pada penghitungan realisasi capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT mencapai 129,27% jika dibandingkan dengan target tw I dan mencapai 9,44% dibandingkan dengan target tahunan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target produksi calon induk unggul untuk operasional UPT telah terpenuhi dan melampaui target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi calon induk unggul ikan air laut di UPT pada TW I tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TW I Tahun 2025. Penurunan realisasi dari TW I tahun 2025 ke TW I Tahun 2026 adalah sebesar 1.320 ekor atau sebesar 71,35% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026. Namun secara target TW I Tahun 2026 sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi dan capaian pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut masing-masing UPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi dan capaian Indikator Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk Operasional pada tiap UPT

No	Nama UPT Ditjen PB	Target Ekor		Realisasi Triwulan I	Prosentase (%)	
		Tahunan	Triwulan I		Tahunan	Triwulan I
1	BBPBL Lampung	250	0	0	0	0
2	BPBL Batam	1.115	315	424	38,03	134,60
3	BPBAP Situbondo	915	0	0	0	0
4	BPBL Lombok	1.665	65	66	3,96	101,54
5	BPBL Ambon	1.667	30	40	2,40	133,33
TOTAL		5.612	410	530	9,44	129,27

Hasil evaluasi pada triwulan I pada indikator kinerja adalah calon induk unggul ikan air laut di UPT sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian triwulan I yang melebihi target yang sudah ditetapkan. Pada poin 1 diatas capaian triwulan I pada calon induk unggul ikan air laut pada 5 satker yaitu 530 ekor.

Capaian tertinggi yaitu pada satker BPBL Batam dengan total 424 ekor. Pada capaian tersebut komoditas calon induk unggul yang dibudidayakan oleh BPBL Batam yaitu bawal bintang total 394 ekor dan ikan hias total 30 ekor. Pada satker BPBL Lombok capaian produksi calon induk unggul yaitu 66 ekor dengan komoditas yang dibudidayakan ikan hias 41 ekor dan lobster 25 ekor. Sedangkan pada BPBL Ambon memiliki capaian 40 ekor pada komoditas yang dibudidayakan yaitu clownfish. Sedangkan pada satker BBPBL Lampung dan BPBAP Situbondo masih proses pemeliharaan budidaya ikan. Mayoritas satuan kerja (satker) yang menjalankan operasional di lapangan

telah melaksanakan rencana aksi dengan efektif, sehingga target awal tahun dapat terlampaui tanpa hambatan teknis yang berarti.

Kendala atas rencana aksi pada satker yang menjalankan operasional di lapangan tidak menemui kendala. Tetapi pada BPBAP Situbondo terdapat kendala ketersediaan input produksi yaitu benih dan bahan operasional belum tersedia di awal triwulan I.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi atas indikator kinerja calon induk unggul ikan air laut di UPT yaitu melanjutkan proses pemeliharaan calon induk unggul ikan air laut.

Pada BPBAP Situbondo tindak lanjut yang dilakukan yaitu telah dilakukan pemeliharaan calon induk kakap putih di awal maret sebanyak 1,500 ekor ukuran 10 cm dan akan melanjutkan proses pemeliharaan calon induk

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator produksi calon induk unggul ikan air laut untuk operasional UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp. 48,690.000 (84,83%) dari pagu Rp 57.397.000
- BPBAP Situbondo: Rp. 61.218.900 (29,15%) dari pagu Rp 210.000.000 (ada blokir Rp. 90.000.000)
- BPBL Ambon: Rp. 89.361.600 (23,34%) dari pagu Rp 382.841.000
- BPBL Batam: Rp. 52.549.775 (15,41%) dari pagu Rp 341.105.000
- BPBL Lombok: Rp. 27.361.500 (7,16%) dari pagu Rp 382.213.000

Total anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator calon induk unggul ikan air laut di UPT adalah sebesar Rp. 279.181.775,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.373.556.000,- atau mencapai 20,33% anggaran terserap.

IKSK 2. Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT

Salah satu indikator kinerja di Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Induk dan Benih adalah produksi calon induk unggul kepiting di UPT. Indikator ini berfokus pada pembesaran kepiting menjadi calon kepiting yang dihasilkan untuk penjualan PNBP dan internal, selain itu juga hasil akhir calon induk kepiting akan digunakan untuk produksi benih kepiting oleh Unit Pelaksana Teknis. Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, dan BPBAP Takalar.

Target indikator kinerja produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 5,747 ekor dan tidak ada target untuk triwulan I.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi calon induk unggul kepiting di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	100	5.747	0	0	0	0

Pada data diatas capaian indikator kinerja produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada triwulan I tahun 2026 tidak memiliki target dan juga belum memiliki realisasi.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi calon induk unggul kepiting di UPT merupakan indikator yang diukur pada tahun 2025, sehingga pada triwulan I tahun 2026 belum dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi dan kendala atas indikator kinerja produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada t riwulan I tidak ada realisasi, hal ini dikarenakan benih dan bahan operasional belum tersedia di awal triwulan I dan masih proses pengadaan bahan operasional. Selain itu juga terdapat kendala stres pada induk akibat penanganan dan lingkungan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut atas indikator kinerja produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada triwulan I yakni mengajukan pengadaan benih kepiting untuk proses pemeliharaan calon induk kepiting. Monitoring kualitas air secara rutin dan stabil serta penanganan induk secara hati-hati.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW IV pada indikator produksi calon induk unggul kepiting di UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPAP Jepara: Rp. 0 (0%) dari pagu Rp 38.411.000

- BPBAP Situbondo: Rp. 249.192.224 (29,15%) dari pagu Rp 920.095.000
- BPBAP Takalar: Rp. 0 (0%) dari pagu Rp 19.767.000

Total anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator calon induk unggul kepiting di UPT adalah sebesar Rp. 249.192.224,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 978.273.000,- atau mencapai 25,47% anggaran terserap

IKSK 3. Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT

Salah satu target capaian kinerja yang dikelola oleh Timja Induk dan Benih pada Direktorat Ikan Air Laut yaitu produksi benih ikan air laut di UPT. Metode perhitungan pada indikator ini yaitu posisi akhir yakni jumlah benih yang dihasilkan untuk penjualan PNBP dan untuk dipelihara menjadi calon induk oleh Unit Pelaksana Teknis. Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBAP Situbondo, BPBL Takalar, BPBL Lombok, BPBL Ambon, dan BPIU2K Karangasem.

Target indikator kinerja produksi benih ikan air laut di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 773.771 ekor dengan target untuk triwulan I yaitu 110.500 ekor.

• Capaian Kinerja

Capaian indikator produksi benih ikan air laut di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	0	773.771	110.500	135.286	122,43	17,48

Pada data diatas capaian indikator kinerja produksi benih ikan air laut di UPT mencapai 135.286 ekor dari target 110.500 ekor dengan persentase 122,43% terhadap target triwulan I dan 17,48% terhadap target target tahunan. Secara capaian indikator produksi benih ikan air laut di UPT sudah mencapai target yang ditetapkan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi benih ikan air laut di UPT merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja produksi benih ikan air laut pada triwulan I menunjukkan hasil yang sangat signifikan melampaui target periodik yang telah ditetapkan.

Tabel 6. Realisasi Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT Tahun 2026

No	Nama UPT Ditjen PB	Target Ekor		Realisasi Triwulan I	Prosentase (%)	
		Tahunan	Triwulan I		Tahunan	Triwulan I
1	BBPBL Lampung	162.436	0	0	0	0
2	BPBL Batam	58.001	5.000	7.250	12,50	145,00
3	BPBAP Situbondo	416.667	68.500	71.256	17,10	104,02
4	BPBAP Takalar	30.000	0	0	0	0
5	BPBL Lombok	30.000	0	0	0	0
6	BPBL Ambon	46.667	30.000	47.780	102,38	159,27
7	BPIU2K Karangasem	30.000	7.000	9.000	30,00	128,57
TOTAL		773.771	110.500	135.286	17,48	122,43

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja produksi benih ikan air laut pada triwulan I menunjukkan hasil yang sangat signifikan melampaui target periodik yang telah ditetapkan. Pencapaian melampaui target dimana realisasi total pada Triwulan I mencapai 135.286 ekor, atau sebesar 122,43% dari target triwulan yaitu sebesar 110.500 ekor. Hingga akhir Maret 2026, yakni total progres terhadap target tahunan sudah mencapai 17,48%, yang berarti on-track untuk mencapai target kumulatif di akhir tahun.

Keberhasilan ini didorong oleh kualitas produksi yang optimal, khususnya pada aspek *Survival Rate* (SR) yang tinggi, *Hatching Rate* (HR) yang maksimal, serta tingkat fekunditas induk yang sangat baik, sehingga output benih per siklus melebihi estimasi awal. Performa masing-masing satker yakni BPBL Ambon menjadi kontributor terbesar pada indikator ini dengan realisasi 30.000 ekor (capaian 159,27% dari target TW I). Sedangkan pada satker BPBL Batam, BPBAP Situbondo, dan BPIU2K Karangasem juga mempunyai progres yang signifikan terhadap produksi benih

ikan air laut pada triwulan I. Sedangkan pada satker yang lain yakni BBPBL Lampung, BPBL takalar, dan BPBL Lombok masih proses pemeliharaan benih ikan air laut.

Meskipun secara angka statistik menunjukkan hasil yang melampaui target, terdapat beberapa catatan teknis dan kendala yang dihadapi di lapangan yakni produksi benih belum mencapai potensi maksimalnya akibat kondisi cuaca di lapangan yang kurang menentu. Fluktuasi suhu dan faktor lingkungan ini sangat memengaruhi stabilitas operasional pembenihan. Terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi parameter biologis (SR dan HR) agar tetap stabil di tengah tantangan iklim, guna memastikan target pada triwulan berikutnya tidak mengalami penurunan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Triwulan I, rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan yakni melanjutkan proses pemeliharaan sehingga bisa berjalan secara optimal dan mendukung peningkatan produksi. Selain itu juga untuk penguatan sarana prasarana pendukung operasional lapangan guna meminimalisir fluktuasi parameter kualitas air akibat cuaca.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW I pada indikator produksi benih ikan air laut di UPT pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp. 13.000.000 (1,90%) dari pagu Rp 682.232.000
- BPBL Batam: Rp. 50.500.000 (17,18%) dari pagu Rp. 294.004.000
- BPBAP Situbondo: Rp. 859.252.105 (51,22%) dari pagu Rp 1.677.600.000
- BPBL Takalar: Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 126.000.000
- BPBL Lombok: Rp. 7.555.500 (5,99%) dari pagu Rp. 126.000.000
- BPBL Ambon: Rp. 8.260.000 (4,21%) dari pagu Rp. 196.000.000
- BPIU2K Karangasem: Rp. 60.823.390 (57,67%) dari pagu Rp. 105.465.000

Total anggaran yang terserap pada TW I pada indikator produksi benih ikan air laut di UPT mencapai Rp 999.390.995 (31.16%) dari pagu Rp 3.207.301.000.

IKSK 4. Produksi Benih Kepiting di UPT

Salah satu indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Induk dan Benih adalah produksi benih kepiting di UPT. Metode perhitungan pada indikator ini yaitu posisi akhir yakni jumlah benih yang dihasilkan untuk penjualan PNBP dan untuk dipelihara menjadi calon induk oleh Unit Pelaksana Teknis. Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPAP Jepara.

Target indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 341,622 ekor dengan target untuk triwulan I yaitu 0.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi benih kepiting di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Produksi Benih Kepiting di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Benih Kepiting di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	0	341.622	0	0	0	0

Capaian triwulan I pada indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT belum ada capaian, hal tersebut dikarenakan masih proses pengadaan bahan operasional.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi benih kepiting di UPT merupakan indikator baru pada Timja Induk dan Benih pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Adapun rincian capaian pada indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Realisasi Produksi Benih Kepiting di UPT Tahun 2026

No	Nama UPT Ditjen PB	Target Ekor		Realisasi Triwulan I	Prosentase (%)	
		Tahunan	Triwulan I		Tahunan	Triwulan I
1	BBPBL Jepara	341.622	0	0	0	0
TOTAL		341.622	0	0	0	0

Hasil evaluasi dan kendala atas indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT pada triwulan I belum ada capaian, hal tersebut dikarenakan masih proses pengadaan bahan operasional oleh BBPBAP Jepara

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut dari indikator kinerja diatas yakni melanjutkan proses pengadaan bahan operasional oleh BBPBAP Jepara.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Realisasi anggaran pada BBPBAP Jepara. Sebagai satker pelaksana indikator kinerja produksi benih kepiting di UPT pada triwulan I belum ada capaian dari pagu anggaran Rp 219,635,000.

IKSK 5. Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT

Salah satu indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Produksi adalah produksi ikan konsumsi di UPT. Timja Produksi mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis menjadi pelaksana yaitu BPBAP Situbondo.

Target indikator kinerja produksi ikan konsumsi air laut di UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 25.000 Kg dengan target untuk triwulan I yaitu 0.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator produksi ikan konsumsi air laut di UPT dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	0	25.000	0	0	0	0

Indikator kinerja Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT BPBAP Situbondo pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi (0%). Hal ini disebabkan kegiatan masih dalam tahap persiapan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana, ketersediaan benih, serta penyusunan jadwal operasional budidaya. Pelaksanaan kegiatan produksi direncanakan dimulai pada Triwulan III Tahun 2026 sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan siklus produksi.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator produksi ikan konsumsi air laut di UPT merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa beberapa tahapan belum dapat dilaksanakan secara optimal pada Triwulan I tahun 2026. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

- 1 Kegiatan pengadaan benih lobster kegiatan produksi budi daya belum tersedia di TW 1.
- 2 Adanya mortalitas pada budi daya kerapu cantang yang terindikasi penyakit di Instalasi Tuban

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mempercepat proses pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung kesiapan produksi;
- b. Melakukan koordinasi intensif dengan penyedia benih untuk memastikan ketersediaan sesuai kebutuhan;
- c. Menyusun jadwal kegiatan produksi secara lebih rinci dan realistis sesuai kondisi lapangan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan sumber daya manusia yang tersedia di UPT

Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan produksi ikan konsumsi air laut pada Triwulan II Tahun 2026, yaitu:

- a. Membuat usulan pengadaan benih lobster;
- b. Melakukan uji laboratoris penyakit iridovirus dan kualitas air;
- c. Mengusulkan penyediaan benih kakap putih untuk kegiatan pembesaran ikan konsumsi air laut

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Realisasi Anggaran kegiatan Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT BPBAP Situbondo sebesar Rp11.687.000.000 (Sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), belum terealisasi (0%) sampai dengan akhir pada akhir Triwulan I Tahun

2026, dikarenakan kegiatan masih dalam tahap persiapan dan akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

IKSK 6. Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Salah satu indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Induk dan Benih adalah benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat. Metode perhitungan pada indikator ini yaitu posisi akhir yakni jumlah benih ikan yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BBPBL Lampung, BPBAP Ujung Batee, BPBL Batam, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, BPBL Ambon, dan BPIU2K Karangasem.

Target indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat oleh UPT pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 4,560,469 ekor dengan target untuk triwulan I yaitu 570,000 ekor.

• **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan Ke Masyarakat				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
306.982	1.434.850	4.560.469	570.000	686.500	120,44	15,05

Pada tabel diatas realisasi pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat sudah terlaksana dengan baik dimana realisasi mencapai 686.500 ekor dari target triwulan I dengan jumlah 570.000 ekor. Pada penghitungan realisasi TW I capaian pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai 15.05% dari target tahunan dan 120,44% jika dibandingkan dengan target triwulan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada TW I tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TW I Tahun 2025, hal ini mengindasikan semakin optimalnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui bantuan benih ikan air laut yang mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan realisasi dari TW I tahun 2025 ke TW I Tahun 2026 adalah sebesar 379.518 ekor atau sebesar 123,63% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi dan kendala atas indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan I sudah mencapai target yang ditentukan dengan volume 686,500 ekor atau 15.05% dari target tahunan yaitu 4,560,469 ekor dan target triwulan I yaitu volume mencapai 686,500 ekor atau 120.44%, sehingga dalam proses pelaksanaan indikator berjalan dengan baik.

Tabel 11. Realisasi dan capaian indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat

No	Nama UPT Ditjen PB	Target Ekor		Realisasi Triwulan I	Prosentase (%)	
		Tahunan	Triwulan I		Tahunan	Triwulan I
1	BBPBL Lampung	1.324.831	200.000	203.500	15,36	101,75
2	BPBAP Ujung Batee	217.388	0	0	0	0
3	BPBL Batam	987.558	50.000	53.000	5,37	106,00
4	BPBAP Takalar	49.018	0	0	0	0
5	BPBL Lombok	692.699	70.000	80.000	11,55	114,29
6	BPBL Ambon	1.088.624	150.000	150.000	13,78	100,00
7	BPIU2K Karangasem	200.351	100.000	200.000	99,82	200,00
TOTAL		4.560.469	570.000	686.500	15,05	120,44

Pada data diatas capaian indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat mencapai 1,434,850 ekor dari target 1,217,027 ekor dengan persentase 117,90%. Persentase capaian tertinggi yaitu BPBAP Ujung Batee dengan volume 200,650 ekor atau 689,02% dan capaian terendah yaitu BPBL Lampung dengan volume 214,000 ekor atau 100,63%.

Berdasarkan capaian diatas jumlah penerima bantuan benih ikan air laut pada masing-masing satker yaitu BBPBL Lampung total 17 kelompok, BPBL Batam total 9

kelompok, BPBL Lombok total 5 kelompok, BPBL Ambon total 5 kelompok, dan BPIU2K Karangasem total 1 kelompok. Secara keseluruhan pada pelaksanaan indikator tersebut tidak menghadapi kendala. Prosentase capaian tertinggi pada indikator kinerja benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan I yaitu BPIU2K Karangasem dan capaian terendah yaitu BPBAP Ujung Batee. Hal tersebut dikarenakan jumlah kelompok masyarakat yang mengusulkan bantuan benih ikan air laut.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan dalam proses bantuan benih ikan air laut yaitu koordinasi terkait usulan CPCL dan melanjutkan proses produksi benih ikan air laut untuk dipergunakan sebagai bantuan benih ikan air laut ke kelompok masyarakat.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap pada TW I pada indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat pada masing-masing satker antara lain:

- BBPBL Lampung: Rp. 765.915.485 (14,03%) dari pagu Rp 5.458.322.000
- BPBAP Ujung Batee: Rp. 297.379.042 (32,59%) dari pagu Rp 912.276.000
- BPBL Batam: Rp. 1.203.454.294 (30,32%) dari pagu Rp. 3.968.943.000
- BPBAP Takalar: Rp. 49.421.820 (23,51%) dari pagu Rp 210.164.000
- BPBL Lombok: Rp. 939.182.918 (31,91%) dari pagu Rp 2.942.946.000
- BPBL Ambon: Rp. 1.585.852.300 (34,22%) dari pagu Rp. 4.634.955.000
- BPIUUK Karangasem: Rp. 311.013.486 (36,37%) dari pagu Rp 855.050.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator benih ikan air laut yang disalurkan ke masyarakat adalah sebesar Rp.5.152.219.345 dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.982.656.000 atau mencapai 27.14% anggaran terserap.

IKSK 7. Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Salah satu indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat Ikan Air Laut melalui Tim Kerja (Timja) Induk dan Benih adalah benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat. Metode perhitungan pada indikator ini yaitu posisi akhir yakni jumlah benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST). Timja Induk dan benih mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis di lingkup DJPB. Unit pelaksana teknis yang menjadi pelaksana yaitu BPBAP Takalar.

Target indikator kinerja benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat oleh BPBAP Takalar pada Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 yaitu 448,658 ekor dengan target untuk triwulan I yaitu 112,164 ekor.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Benih Ikan Air Laut yang Disalurkan Ke Masyarakat				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
50.000	175.000	448.658	112.164	100.000	89,16	22,29

Pada tabel diatas realisasi pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat mencapai 100.000 ekor dari target TW I 112.164 ekor. Pada penghitungan persentase realisasi TW I, capaian pada indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat mencapai 89,16% jika dibandingkan dengan target triwulan I dan 22,29% jika dibandingkan dengan target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada TW I tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TW I Tahun 2025, hal ini mengindasikan semakin optimalnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat melalui bantuan benih kepiting yang mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan realisasi dari TW I tahun 2025 ke TW I Tahun 2026 adalah sebesar 50.000 ekor atau sebesar 100% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Hasil evaluasi dan kendala atas indikator kinerja benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan I tidak mencapai target yang ditentukan dengan volume 100,000 ekor dari target 112.164 ekor. Kelompok penerima pada bantuan tersebut yaitu Nikarannuang yang berlokasi di Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan.

Kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target pada triwulan I ada pada produksi benih yaitu ketersediaan pakan alami yang tidak stabil.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan dalam proses bantuan benih kepiting yaitu koordinasi terkait usulan CPCL dan melanjutkan proses produksi benih kepiting untuk dipergunakan sebagai bantuan benih kepiting ke kelompok masyarakat.

Tindak lanjut produksi di lapangan yaitu peningkatan kultur dan pemberian pakan alami secara merata.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Realisasi anggaran pada indikator kinerja benih kepiting yang disalurkan ke masyarakat pada triwulan I pada BPBAP Takalar yaitu Rp 5,275,000 (1,63%) dari pagu anggaran Rp 322,540,000.

IKSK 8. Sampel Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

Indikator Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan merupakan jumlah sampel yang terdiri dari sampel residu, sampel, kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang dilakukan oleh 4 UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Ambon dan BPBL Lombok. Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 1.842 sampel dan pada triwulan I sebanyak 488 sampel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
2.013	7.449	1.842	488	667	136,68	36,21

Berdasarkan tabel diatas pada penghitungan realisasi, capaian sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium sebesar 667 sampel atau mencapai 136,68% terhadap target triwulan I dan 36,21% dari target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan pada TW I tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TW I Tahun 2025. Penurunan realisasi dari TW I tahun 2025 ke TW I Tahun 2026 adalah sebesar 1.346 sampel atau sebesar 66,87% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026. Namun secara target TW I Tahun 2026 sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi capaian indikator kinerja sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel) diperoleh dari 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPBL Ambon.

Capaian indikator kinerja sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa dari total target sebanyak 1.842 sampel, telah terealisasi 667 sampel atau sebesar 36,21%. Secara rinci, BBPBL Lampung mencatat capaian tertinggi dengan 152 sampel (76,00%), diikuti BPBL Batam dengan 162 sampel (45,00%), BBPBL Lombok dengan 187 sampel (32,13%), dan BPBL Ambon dengan 166 sampel (23,71%). Secara keseluruhan, kegiatan telah berjalan, namun masih diperlukan percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Capaian Sampel Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan di UPT-DJPB Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Laboratorium	Target Tahunan UPT	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	BPBL Batam	360	162	45.00
2	BBPBL Lampung	200	152	76.00
3	BPBL Lombok	582	187	32.13
4	BPBL Ambon	700	166	23.71
Total		1,842	667	36.21

Secara umum, kontribusi terbesar berasal dari pengujian kualitas air sebanyak 574 sampel, diikuti mikrobiologi (non-AMR) sebanyak 39 sampel, biologi molekuler 36 sampel, dan patologi 18 sampel, sementara pengujian residu

belum menunjukkan realisasi. Secara per UPT Ikan Air Laut, BBPBL Lampung merealisasikan 152 sampel (76,00%) yang seluruhnya berasal dari pengujian kualitas air, demikian pula BPBL Batam dengan 162 sampel (45,00%) yang juga didominasi kualitas air. Sementara itu, BBPBL Lombok menunjukkan variasi ruang lingkup pengujian dengan total 187 sampel (32,13%) yang terdiri dari kualitas air, mikrobiologi, biologi molekuler, dan patologi. BPBL Ambon merealisasikan 166 sampel (23,71%) dengan dominasi kualitas air serta sebagian kecil pada mikrobiologi dan biologi molekuler. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengujian telah berjalan, namun masih didominasi oleh parameter kualitas air, sementara pengujian lainnya masih terbatas dan memerlukan optimalisasi pada periode berikutnya.

Tabel 15. Realisasi “Sampel Penyakit Ikan Air Laut dalam rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (sampel)” Berdasarkan Ruang Lingkup Triwulan I Tahun 2026.

No	UPT DJPB	Ruang Lingkup					Total	%
		Kualitas Air	Mikrobiologi	Patologi	Biologi Molekuler	Residu		
1	BBPBL Lampung	152	0	0	0	0	152	76,00
2	BPBL Batam	162	0	0	0	0	162	45,00
3	BPBL Lombok	119	26	18	24	0	187	32,13
4	BPBL Ambon	141	13	0	12	0	166	23,71
Total		574	39	18	36	0	667	36,21

Indikator Kinerja sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dalam pencapaiannya masih terdapat kendala, kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran sehingga tidak semua ruang lingkup dapat dilaksanakan pengujian laboratorium. Dampaknya, pelaksanaan monitoring lebih banyak bersifat pasif dan sampel yang diuji cenderung berasal dari lingkungan sekitar balai, sehingga cakupan dan representativitas data menjadi terbatas.

• **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut, UPT perlu mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia agar pelaksanaan pengujian sampel penyakit ikan air laut dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dapat berjalan lebih efektif. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, diharapkan kegiatan monitoring tidak hanya bergantung pada pendekatan pasif, tetapi juga dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan surveilans aktif secara lebih optimal.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW IV dari masing-masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 52.849.000
- BPBL Batam sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 120.000.000
- BPBL Ambon sebesar Rp. 49.347.430 (19,65%) dari pagu Rp. 251.102.000
- BPBL Lombok sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 205.200.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan adalah sebesar Rp. 49.347.430 dari pagu anggaran sebesar Rp. 629.151.000 atau mencapai 7,84% anggaran terserap.

IKSK 9. Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT

Indikator Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan hasil evaluasi terhadap laporan monitoring produksi pakan alami di UPT Laut lingkup DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBL Ambon dan BPBAP Situbondo. Indikator Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT memiliki target tahunan sebesar 4 Laporan dan pada triwulan I sebanyak 1 Laporan.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	0	4	1	1	100	25

Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT Capaian kinerja pada triwulan 1 telah terpenuhi yaitu sebanyak 1 laporan monitoring produksi pakan alami di 5 (lima) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok, BPBL Ambon dan BPBAP Situbondo.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Pakan ikan air laut yang diproduksi untuk operasional UPT merupakan indikator baru pada Timja Pakan pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan monitoring produksi pakan alami di UPT Laut lingkup DJPB secara keseluruhan dinilai sudah sangat baik karena seluruh UPT telah melaporkan kegiatan budi daya pakan alami guna mendukung kegiatan pembenihan ikan laut sesuai dengan format yang telah disepakati pada rapat koordinasi sebelumnya. Kendala atas rencana aksi sampai dengan triwulan ke-1 belum ditemukan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Terkait dengan koordinasi untuk triwulan selanjutnya perlu dilakukan secara berkala guna membahas perkembangan produksi pakan alami dan kendala yang dihadapi oleh UPT serta meningkatkan sinergitas antara Timja Pakan Ikan laut dalam memperdalam pengetahuan terkait produksi pakan alami. Rencana ke depan Timja Pakan Ikan Laut akan mengadakan webinar terkait dengan pentingnya efisiensi pakan alami dan pakan buatan dalam peningkatan produksi ikan laut. Rencana pelaksanaan pada triwulan 2 dan 3. Pengujian sampel pakan yang telah dilakukan tidak hanya spesifik pada pakan pabrikan ikan laut, namun juga dilakukan pada pakan pabrikan ikan tawar, pakan mandiri dan bahan baku pakan serta makanan olahan berbasis ikan sehingga untuk target yang ditentukan spesifik sampel pakan ikan laut hanya sedikit yang dapat dipenuhi;

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Indikator kinerja Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT yang dilaksanakan oleh Timja Pakan Ikan Laut sampai dengan saat ini tidak ada alokasi anggaran dalam kegiatan tersebut. Untuk itu kegiatan ini kedepannya memerlukan koordinasi yang kuat dengan UPT serta perlunya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan webinar melalui daring guna memberikan wawasan kepada para pembudidaya ikan laut dapat meningkatkan produksinya melalui peningkatan pemanfaatan pakan alami maupun buatan secara efektif dan efisien.

IKSK 10. Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun

Indikator Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut merupakan dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) yang disusun oleh Tim Kerja di Direktorat Ikan Air Laut yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia (RSNI), Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Direktur Jenderal

Perikanan Budi Daya, serta Petunjuk Teknis maupun Kajian yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan budi daya ikan air laut.

Target Rekomendasi Kebijakan yang akan dihasilkan pada Tahun 2026 sebanyak 3 (tiga) (Rekomendasi Kebijakan) dan pada triwulan I belum terdapat target capaian karena pengukuran indikator kinerja ini dilakukan pada akhir tahun.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun sebagaimana terlihat pada dibawah ini.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut Yang Disusun				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	6	3	0	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas pada penghitungan realisasi, masih belum ada capaian indikator kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut pada triwulan I dikarenakan indikator ini dilakukan pengukuran kinerja pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut merupakan indikator yang diukur pada akhir tahun sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Laut merupakan dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) yang disusun oleh Tim Kerja di Direktorat Ikan Air Laut yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) judul, yaitu: Deteksi iridovirus pada ikan dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR), Pembesaran Ikan Kakap Putih (*Lates calcarifer*, Bloch 1790), dan Pembesaran ikan bawal bintang (*Tracchinatus blochii Lacepede*) di karamba jaring apung (KJA). Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut dilakukan selama 1 tahun berjalan sehingga pada Triwulan I Belum terdapat capaian secara keseluruhan sebagaimana pada Tabel 1. Dapat dilaporkan bahwa progress kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pembahasan RSNI 1 terhadap ketiga konsep RSNI tersebut pada tanggal 11 – 13 Maret 2026.

Selain dokumen RSNI sebagaimana disampaikan, Direktorat Ikan Air Laut juga menyiapkan rancangan dokumen Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut berupa Pedoman Pengelolaan Pembudidayaan Lobster sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan (*Portunus* Spp.). Usulan rancangan dokumen tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dengan melibatkan Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB.

Berdasarkan hasil evaluasi, telah dilaksanakan Rapat RSNI 1 yang dilakukan secara hybrid. Rapat ini merupakan tahapan yang harus dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan tata kelola berupa SNI. Tahapan lanjutan yang harus dilakukan adalah melanjutkan pembahasan RSNI 2 dan RSNI 3. Pembahasan dan pleno terkait rancangan dokumen Pedoman Pengelolaan Pembudidayaan Lobster perlu dilakukan sebagai bagian dari proses pengajuan dokumen Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

Tidak terdapat kendala pada rencana aksi dalam mencapai indikator kinerja kebijakan tata Kelola bidang budidaya ikan air laut ini.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut atas kegiatan ini adalah melaksanakan kegiatan RSNI 2 dan RSNI 3 secara hybrid serta melanjutkan proses usulan rancangan Pedoman Pengelolaan Pembudidayaan Lobster sehingga capaian dapat terealisasi sesuai waktu yang ditentukan.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran untuk menunjang tercapainya indikator tersebut dianggarkan sebanyak Rp. 247.143.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.186.700 atau sekitar 25,97% pada triwulan I.

IKSK 11. Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji merupakan sampel monitoring pasif dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium sesuai dengan gejala penyakit yang ditemukan atau sesuai yang direncanakan/diminta bila tidak ada gejala penyakit. Sampel yang diambil tidak hanya terkait dengan komoditas ikan saja namun juga meliputi pakan, air dan sedimen yang juga dapat menjadi media pembawa penyakit ikan air payau. Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan.

Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji merupakan jumlah sampel hasil kegiatan monitoring penyakit ikan air laut yang dilakukan oleh BBPBL

Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPBL Ambon yang diuji di laboratorium. Indikator Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji memiliki target tahunan sebesar 340 sampel.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kebijakan Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
10	99	340	75	113	150,67	33,24

Berdasarkan tabel diatas Pada penghitungan realisasi, capaian sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji sebesar 113 sampel atau mencapai 150,67%, terhadap target tw I sedangkan capaian tahunan mencapai 33,24% terhadap target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator sampel monitoring penyakit ikan air laut pada TW I tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TW I Tahun 2025, hal ini mengindasikan semakin optimalnya pelayanan laboratorium UPT DJPB khususnya dalam pelayanan pengujian penyakit ikan air laut yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan realisasi dari TW I tahun 2025 ke TW I Tahun 2026 adalah sebesar 103 sampel atau sebesar 1.030% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja monitoring penyakit ikan air laut menunjukkan bahwa dari target 340 sampel, baru terealisasi 113 sampel atau 33,24%. UPT Ikan Air Laut dengan capaian tertinggi adalah BPBL Batam (48,33%), disusul BPBL Lombok dan Ambon yang sama-sama mencapai 36,67%. Sementara itu, BBPBL Lampung baru merealisasikan 25% dari target. Secara keseluruhan, tingkat capaian masih relatif rendah sehingga diperlukan peningkatan pelaksanaan uji sampel di semua UPT agar target tahunan dapat tercapai, rincian ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 19. Capaian Sampel monitoring penyakit ikan Air Laut yang diuji UPT DJPB di Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Laboratorium	Target Tahunan UPT	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	BPBL Batam	160	40	25,00
2	BBPBL Lampung	60	29	48,33
3	BPBL Lombok	60	22	36,67
4	BPBL Ambon	60	22	36,67
Total		340	113	33,24

Pada triwulan I tahun 2026 penyakit ikan yang dilakukan monitoring oleh UPT Ikan Air Laut antara lain *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (AHPND), *Grouper Sleepy Disease Iridovirus* (GIV), *Hepatopancreatic Microsporidiosis* (EHP), *Infection with Dactylogyrus* sp., *Infection with Infectious Myonecrosis Virus* (IMNV), *Infection with Megalocytivirus*, *Infection with White Spot Syndrome Virus* (WSSV), *Milky Haemolymph Disease*, *Trichodiniasis*, *Vibriosis*, *Viral Nervous Necrosis* (VNN).

Jenis ikan yang dimonitoring penyakit nya meliputi Bawal Bintang, Ikan Badut, Ikan Cobia, Kakap Putih, Kerapu Bebek, Kerapu Cantang, Kuwe, Lobster Pasir, Nila, serta Udang Vaname. Keseluruhan spesies ini merupakan komoditas penting dalam budidaya maupun perikanan, dengan variasi mulai dari ikan hias seperti Ikan Badut hingga komoditas konsumsi bernilai tinggi seperti Kakap Putih, Kerapu, Lobster, dan Udang Vaname.

Berdasarkan hasil pengujian, penyakit ikan yang ditemukan positif adalah *Viral Nervous Necrosis* (VNN), *Vibriosis*, *Milky Haemolymph Disease*, *Infection with megalocytivirus*, *Infection with Dactylogyrus* sp., *Trichodiniasis*, *Infection with White Spot Syndrome Virus* (WSSV) sedangkan untuk penyakit lain yang dilakukan monitoring menunjukkan hasil negatif.

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang memengaruhi efektivitas pengambilan sampel penyakit ikan di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada terbatasnya dukungan operasional, sehingga UPT mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring penyakit aktif, baik dari sisi frekuensi kunjungan, jangkauan wilayah, maupun jumlah sampel yang dapat dikumpulkan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang dihadapi, diperlukan upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia oleh masing-masing UPT agar pelaksanaan monitoring penyakit ikan air laut dapat berjalan lebih efektif dan optimal

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW IV dari masing-masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp.36.405.000 (16,72%) dari pagu Rp. 217.700.000
- BPBL Batam sebesar Rp. 1.270.000 (2,11%) dari pagu Rp. 60.291.000
- BPBL Ambon sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 71.436.000
- BPBL Lombok sebesar Rp. 2.050.000 (2,73%) dari pagu Rp 75.000.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk indikator Sampel monitoring penyakit ikan air laut adalah sebesar Rp. 39.725.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 424.427.000 atau mencapai 9,36% anggaran terserap.

IKSK 12. Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji

Indikator Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloxacin.

Target indikator kinerja sampel monitoring surveillance AMU/AMR yang diuji di Direktorat Ikan Air Laut tahun 2025 sebesar 216 sampel.

• Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
27	90	216	53	72	135,85	33,33

Indikator Pengujian sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji untuk komoditas ikan air laut dilaksanakan di 4 UPT- DJPB yaitu di BBPBL Lampung, BPBL Ambon, BPBL Batam dan BPBL Lombok, pada triwulan I terdapat realisasi pengujian sampel AMR sebanyak 72 sampel atau sebesar 135,85% dari target triwulan I dan 33,33% dari target tahunan sebesar 216 sampel.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji pada TW I tahun 2026 memiliki realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TW I Tahun 2025, hal ini mengindasikan semakin optimalnya Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2025 ke 2026. Peningkatan realisasi dari TW I tahun 2025 ke TW I Tahun 2026 adalah sebesar 45 sampel atau sebesar 166,67% dan untuk perbandingan tahunan belum dapat diukur menunggu saat realisasi Tahun 2026.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji (sampel) diperoleh dari 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB yaitu BBPBL Lampung, BPBL Batam, BPBL Lombok dan BPBL Ambon.

Capaian indikator kinerja sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji pada Triwulan I Tahun 2026 oleh UPT Ikan Air Laut menunjukkan bahwa dari total target tahunan sebanyak 216 sampel, telah terealisasi 72 sampel atau sebesar 33,33%, yang mengindasikan bahwa capaian masih belum optimal pada awal tahun. Secara rinci, BBPBL Lampung mencatat capaian tertinggi dengan 35 sampel (46,67%), diikuti BPBL Batam dengan 20 sampel (30,30%) dan 12 sampel (24,00%), sementara BPBL Lombok menunjukkan capaian terendah dengan 5 sampel (20,00%). Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surveilans AMU/AMR telah berjalan, namun masih memerlukan percepatan pada triwulan berikutnya agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Tabel 21. Rincian target dan realisasi sampel survailan resistensi antimikroba Triwulan I Tahun 2026 di 4 UPT-DJPB

No	Nama UPT Ditjen Perikanan Budi Daya	Target Sampel (Tahunan)	Realisasi Triwulan IV	Prosentase (%)
1	BPBL Batam	75	35	46,67
2	BBPBL Lampung	66	20	30,30
3	BPBL Lombok	25	5	20,00
4	BPBL Ambon	50	12	24,00
Total		216	72	33,33

No	UPT	Target sampel	Komoditas	Target sampel	Realisasi
1	BBPBL Lampung	75	Kerapu	25	6
			Kakap	25	15
			Bawal	25	14
2	BPBL Batam	66	Kerapu	16	6
			Kakap	32	8
			Bawal	18	6
3	BPBL Lombok	25	Kakap	12	2
			Bawal	13	3
4	BPBL Ambon	50	Kakap	20	5
			Kuwe	30	7
Total				216	72

Hasil pengujian sampel monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji didapatkan dari 3 komoditas ikan yang menjadi target pengambilan sampel, yaitu Kerapu, Kakap dan Bawal, dengan isolat bakteri target yang digunakan *Vibrio alginolyticus*.

Sampel AMR tersebut dilakukan identifikasi bakteri untuk mendapatkan isolate bakteri target dan jika ditemukan bakteri targetnya, maka pengujian dilanjutkan ke pengujian *Antimicrobial Sensitivity Test* (AST) dengan menggunakan metode agar disk difusi. Metode ini bertujuan untuk menentukan apakah bakteri target sensitif, intermediate atau resisten terhadap antibiotik yang digunakan dalam pengujian.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut, salah satunya adalah adanya efisiensi anggaran yang berdampak langsung terhadap kegiatan operasional di lapangan. Keterbatasan anggaran tersebut berimplikasi pada berkurangnya intensitas kegiatan sampling, terbatasnya mobilisasi tim pelaksana, serta penyesuaian jumlah dan frekuensi kunjungan ke lokasi budi daya.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi Rencana Aksi dan tindak lanjut Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring surveilans Resistensi Antimikroba (AMR), salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran yang terserap sampai dengan TW IV pada Sampel Monitoring Survailan AMR yang diuji di masing masing satker adalah sebagai berikut:

- BBPBL Lampung sebesar Rp. 1.261.000 (2,85%) dari pagu Rp. 44.173.000
- BPBL Ambon sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 32.949.000
- BPBL Batam sebesar Rp. 9.802.000 (24,88%) dari pagu Rp. 14.624.000
- BPBL Lombok sebesar Rp. 0 (0%) dari pagu Rp. 16.474.000

Anggaran yang sudah terealisasi untuk Indikator Sampel Monitoing Survailan AMR yang diuji adalah sebesar Rp. 11.063.010 dari pagu anggaran sebesar Rp. 132.995.000 atau mencapai 8,32% anggaran terserap.

IKSK 13. Kawasan Budi Daya Lobster yang Dibangun atau Direvitalisasi

Pelaksanaan Pembangunan atau Revitalisasi Kawasan budi daya lobster yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Laut dilakukan oleh Satker Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam dengan target utama berupa pengembangan produksi lobster. Tim kerja Kawasan Budi Daya Air Laut mempunyai tanggung jawab untuk menghimpun data realisasi dari unit pelaksana teknis dari BPBL Batam. Target indikator Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi sebesar 1 unit.

- **Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi sebagaimana pada Tabel 22.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Kawasan Budi Daya Lobster Yang Dibangun Atau Direvitalisasi				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	0	1	0	0	0	0

Sesuai pada tabel 225 dapat dilihat bahwa indikator Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi belum terdapat capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Kawasan budi daya lobster yang dibangun atau direvitalisasi merupakan indikator baru pada Timja Kawasan pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Berdasarkan hasil evaluasi, telah dilaksanakan kegiatan produksi lobster baik pada unit *nursery* dan pembesaran di Karamba Jaring Apung (KJA). Berdasarkan data keragaan produksi pada modeling budi daya lobster, terlihat bahwa unit *nursery* dan KJA telah dimanfaatkan dan sedang dalam proses produksi.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut atas kegiatan ini adalah melanjutkan kegiatan modeling budidaya lobster yang telah berjalan dan kemungkinan pengembangan skala produksi pada unit tersebut dan menjadikan modeling budi daya lobster di BPBL Batam sebagai bentuk integrasi dan revitalisasi kawasan budi daya.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran kegiatan Pembangunan atau Revitalisasi Budi Daya Lobster berada di Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam dengan PAGU Rp.175.000.000 dan realisasi pada Triwulan 1 mencapai Rp.118.870.000 (67,93%).

IKSK 14. Unit Usaha yang Dilakukan Pembinaan Serfikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB dan CPIB)

Indikator Unit usaha yang dilakukan pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan kegiatan pembinaan yang terdiri dari:

- 1) Pembinaan CBIB adalah pembinaan cara budidaya ikan yang baik untuk unit budi daya ikan air laut agar hasil produksi perikanan budidayanya sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Pembinaan CBIB dilakukan sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan sertifikasi CBIB ke sistem OSS. Pada saat ini, penerapan CBIB bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021.
- 2) Pembinaan CPIB adalah pembinaan cara pembenihan ikan yang baik yang dilakukan terhadap seluruh unit budi daya ikan air laut yang memproduksi benih ikan sehingga induk dan benih yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan.

Pembinaan CBIB dan CPIB pada unit budidaya ikan air laut dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sedangkan sertifikasi

CBIB dan CPIB dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan indikator kinerja Direktorat Ikan Air Laut dalam mendukung peningkatan mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan usaha perikanan budi daya. Tim pelaksana kegiatan adalah Tim Kerja Produksi, Direktorat Ikan Air Laut. Indikator kinerja unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi penerapan standar sertifikasi pada unit budidaya ikan laut, sebagai upaya peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta peningkatan kinerja tata kelola unit usaha.

Target tahunan Indikator kinerja unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) adalah sebanyak 200 (Unit) dengan rincian 150 unit untuk CBIB dan 50 unit untuk CPIB.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB dan CPIB)

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CPIB dan CBIB)				
2025		2026			% Capaian tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2024	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
-	-	200	0	0	0	0

Pada tabel diatas realisasi TW I pada indikator unit usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budi daya ikan air laut (CPIB dan CBIB) belum terdapat capaian dikarenakan tidak ada target pada triwulan ini.

- **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Unit Budi Daya Ikan Air Laut yang dibina penerapan Sertifikasi Perikanan Budi Daya (CBIB dan CPIB) merupakan indikator yang diukur tahunan sehingga pada triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Unit Usaha yang dilakukan pembinaan sertifikasi perikanan budidaya ikan air laut (CPIB dan CBIB) pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat realisasi (0%). Hal ini disebabkan kegiatan masih dalam tahap penyiapan data unit usaha, verifikasi awal kesiapan sertifikasi serta koordinasi dengan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi direncanakan dimulai Triwulan selanjutnya di tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- a. Belum optimalnya kesiapan unit usaha dalam pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi sertifikasi CPIB dan CBIB;
- b. Keterbatasan waktu pada Triwulan I yang difokuskan pada penyusunan rencana kerja dan koordinasi.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Untuk mengatasi kendala tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan pembinaan melalui penjadwalan yang lebih efektif pada Triwulan berikutnya.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan unit usaha perikanan budi daya agar lebih siap dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.
- c. Mengoptimalkan peran tenaga teknis dan penyuluh perikanan dalam kegiatan pendampingan.
- d. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait CPIB dan CBIB kepada pelaku usaha budidaya ikan air laut

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

Anggaran kegiatan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut Rp.156.601.000 (Seratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu rupiah), sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum terealisasi (0%), dikarenakan kegiatan masih dalam tahap persiapan teknis dan administrasi. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

IKSK 15. Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya

Sosialisasi adalah upaya untuk memasyarakatkan sesuatu agar dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Indikator Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan, program kerja, dan kompetensi dalam bidang perikanan budi daya. Dengan

tercapainya indikator kinerja tersebut diharapkan penyebaran informasi dapat tersampaikan dengan baik, terimplementasikan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Target indikator kinerja Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya sebanyak 500 orang.

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut				
IKSK		Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	0	500	0	0	0	0

Pada tabel diatas Realisasi Sosialisasi Kebijakan/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya lingkup DJPB (Direktorat Ikan Air Laut dan UPT) sebesar 4.399 orang atau 104,41% dari target tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Sosialisasi NSPK Perikanan Budi Daya merupakan indikator baru pada Timja Produksi pada tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Target Indikator Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya pada tahun 2026 yaitu 500 orang dengan perhitungan tahunan. Hingga Triwulan I ini telah dilakukan sosialisasi NSPK bidang perikanan budi daya kepada 258 orang. Namun, capaian ini tidak masuk kedalam capaian IKU, karena perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.

Hasil evaluasi dari Kegiatan sosialisasi NSPK yang telah dilaksanakan di triwulan I perlu adanya penambahan peserta sosialisasi mengingat amdal merupakan hal penting dalam tahapan pelaksanaan kegiatan revitalisasi ini. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi NSPK tidak terdapat kendala yang dihadapi dan berjalan dengan lancar.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi NSPK di triwulan II perlu adanya perencanaan yang matang mulai dari peserta, materi yang akan disampaikan serta perlu koordinasi lebih baik lagi dengan pemerintah daerah atau stake holder lainnya. Pada triwulan II atau III akan dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan pakan alami dan sosialisasi terkait kegiatan revitalisasi tambak pantura di Provinsi Jawa Barat.

- **Realisasi Penggunaan Anggaran**

IKU Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya tidak memiliki DIPA Anggaran khusus sehingga beberapa kegiatan akan dilakukan bersamaan dengan anggaran pada kegiatan revitalisasi tambak pantura di Provinsi Jawa Barat.

SK.02. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima. Sasaran Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja, yaitu:

IKSK 16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Ikan Air Laut berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan IV Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Laut yang menjadi objek pengawasan. Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja satker Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2026 memiliki target sebesar 86%.

- **Capaian Kinerja**

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Ikan Air Laut yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 1 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026).

Capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
92,86	85	86	86	88,24	102,60	102,60

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Satker Direktorat Ikan Air Laut tercatat sebesar 88,24%. Angka ini melampaui target triwulan maupun target tahunan sebesar 86, dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 102,60%. Capaian ini mencerminkan optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka perbaikan kinerja satuan kerja secara berkelanjutan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Pada triwulan I tahun 2025, capaian realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut mencapai 92,68% sedangkan pada triwulan I Tahun 2025 mencapai 88,24%, dari data tersebut menunjukkan jika dibandingkan pada triwulan I di masing-masing tahun indikator ini mengalami penurunan sebesar 4.62% sedangkan untuk perbandingan antar tahun belum dapat dilakukan, meskipun demikian realisasi pada triwulan I tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang positif karena telah melampaui target yang ditetapkan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Sesuai Surat Inspektur III Inspektorat Jenderal Nomor T.276/ITJ.3/HP.510/IV/2026 tanggal 3 April 2026 perihal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen KKP lingkup DJPB Triwulan I Tahun 2026, Direktorat Ikan Air Laut memiliki beberapa temuan dan saran antara lain:

- 1) Hasil pemantauan kegiatan persiapan revitalisasi eks. tambak udang Pantura Jawa Barat TA. 2025 memiliki 12 Temuan dan 13 Saran dengan nilai keuangan Rp. 0 dan

telah ditindaklanjuti sebanyak 10 temuan dan 11 saran dan masih tersisa 2 temuan dan 2 saran untuk ditindaklanjuti; dan

- 2) Hasil revidi pekerjaan penyusunan Studi Kelayakan, Master Plan, Tata Batas dan AMDAL revitalisasi tambak pantura Jawa Barat terdapat 3 temuan, 4 saran dengan nilai keuangan sebesar Rp. 0 dan telah ditindaklanjuti secara tuntas.

Dari penjelasan diatas Pada triwulan I ini hasil pengawasan tersebut ada yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Satker Direktorat Ikan Air Laut dan masih ada temuan dan saran yang tersisa sehingga realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mendapatkan nilai capaian sebesar 88,24%.

Tabel 26. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut, Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Direktorat Ikan Air Laut	88,24
2	Direktorat Rumput Laut	92,31
3	Direktorat Ikan Air Tawar	100,00
4	Direktorat Ikan Air Payau	100,00
5	Direktorat Prasarana dan Sarana	97,46

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 pada level unit kerja, Direktorat Ikan Air Laut memiliki capaian tindak lanjut sebesar 88,24%, yang nilai capaiannya lebih kecil dibandingkan dengan 4 Direktorat lain di lingkup DJPB (Direktorat Air Tawar, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Prasarana dan Sarana dan Direktorat Rumput Laut). Hal ini menunjukkan bahwa satker Direktorat Ikan Air Laut perlu lebih optimal dalam menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai dasar perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Ikan Air Laut.

Kendala dalam mencapai indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah masih terdapat temuan dan saran dari TA. 2025 yang belum selesai ditindaklanjuti dan juga masih ada sisa rekomendasi yang sudah cukup lama saat masih SOTK lama, LHP yang terbit pada tahun 2015 yaitu LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 pada Satker Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan sisa sebanyak 1 (satu) temuan dengan 1 (satu) saran dan nilai keuangan Rp41.426.478,00 yang perlu diselesaikan.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja (%), yaitu melengkapi dokumen dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi berupa saran dan temua Itjen yang belum selesai.

IKSK 17. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut

Indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Ikan Air Laut sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 84,2 (Nilai).

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	84,45	84,2	0	0	0	0

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 84,2 (Nilai) dan pada Triwulan I indikator ini belum bisa dihitung dikarenakan pengukuran indikator dilakukan secara tahunan.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 dan 2026 diukur pada akhir tahun sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan I, telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi antara lain: Perjanjian Kinerja, Dialog kinerja (cascading), Rencana Aksi, Manual Indikator Kinerja dan dokumen pengukuran kinerja diantaranya: evaluasi rencana aksi dan laporan kinerja. Dokumen tersebut seluruhnya diupload di aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/> sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP. Tidak terdapat kendala dalam mencapai target indikator ini.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi untuk mencapai indikator kinerja adalah a) membuat rencana kinerja Direktorat Ikan Air Laut setiap tahun dengan sebaik-baiknya, b) melaporkan realisasi kinerja dan melakukan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya, c) mendokumentasikan segala dokumen yang berkaitan dengan penilaian mandiri SAKIP dengan baik dan mudah diakses, dan d) melaksanakan penilaian mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Laut.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mencapai indikator kinerja adalah melakukan penyusunan dokumen kinerja lebih awal agar pengumpulan dokumen yang dilakukan setiap triwulan bisa tepat waktu dan dapat segera diupload dokumen tersebut ke aplikasi aplikasi ESR MenPan: <https://esr.menpan.go.id/> maupun Kinerjaku: <https://kinerjaku.kkp.go.id/>.

IKSK 18. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN Unit Organisasi Level II yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:

- a) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
- c) Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja; dan 4) Disiplin.

- 1) Indikator dimensi **kualifikasi** yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);

- b. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

- 2) Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi **kompetensi** yang digunakan, terdiri dari:
 - a) Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
 - b) Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - 2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
 - 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

- 3) Indikator dimensi **kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

- 4) Indikator dimensi **disiplin** yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat,

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

- b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi Level II} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level II}}$$

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu

didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut memiliki target tahunan sebesar 81,5 (Indeks).

- **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Ikan Air Laut				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	81,24	81,5	0	0	0	0

Sesuai pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut belum memiliki capaian karena pengukuran indikator ini dilakukan pada Semester 1 Tahun 2026.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 dan 2026 diukur pada Semester 1 dan Semester 2 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator Kinerja IP ASN ini memiliki target tahunan sebesar 81,5 (Indeks) yang akan dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara dan pada triwulan I ini belum dapat dilakukan penghitungan karena pengukuran dilakukan pada semester 1 dan semester 2 pada tahun berjalan sehingga realisasi berikutnya pada semester 1.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Pegawai Direktorat Ikan Air Laut dengan berfokus pada perbaikan nilai kinerja individu maupun unit kerja. Upaya tersebut akan didukung melalui peningkatan kompetensi pegawai, antara lain dengan mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan, workshop, serta

kegiatan lain yang mendukung peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja. Melalui langkah ini, diharapkan kinerja Direktorat Ikan Air Laut dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

IKSK 19. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Capaian indikator kinerja ini diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Target yang ditetapkan pada tahun 2026 untuk Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut adalah 81 (nilai).

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Direktorat Ikan Air Laut dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Ikan Air Laut				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	84,27	81	0	0	0	0

Realisasi Indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025**

Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2025 dan 2026 diukur pada akhir tahun sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Realisasi Indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan I tahun 2026 belum terdapat capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun dan dalam pelaksanaannya indikator kinerja ini masih terdapat kendala yaitu masih terdapat pegawai yang belum memahami penulisan tata naskah yang benar.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut pada periode selanjutnya adalah a) dilakukan sosialisasi kembali kepada setiap pegawai Direktorat Ikan Air Laut terkait format yang benar dalam penulisan tata naskah, dan b) melakukan proses mendokumentasikan arsip dinamis aktif, arsip in aktif dan usul musnah dengan baik di Direktorat Ikan Air Laut

IKSK 20. Persentase Layanan Perkantoran

Indikator Persentase Layanan Perkantoran terdiri penghitungan capaian indikator tersebut diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 4 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur sebagai berikut:

- **Persuratan**

Layanan persuratan yang dilaksanakan adalah berupa pemberian nomor surat yang ditandatangani secara manual.

- **Rapat Offline**

Layanan rapat yang dilaksanakan adalah berupa layanan penyiapan konsumsi peserta rapat dan penyediaan sarana pendukung rapat lainnya.

- **Keuangan**

Layanan yang dilaksanakan berupa:

- a. Berupa dokumen SPJ yang diverifikasi
- b. Dokumen SPJ Perdin rampung
- c. Pengajuan SPM
- d. Pendaftaran kontrak

- **Kepegawaian**

Layanan dari kepegawaian berupa:

- a. Peremajaan SIASN

- b. Layanan Mutasi
- c. Cuti

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Layanan Perkantoran Yang Direalisasikan}}{\text{Target Layanan Perkantoran}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan pada tahun 2026 untuk Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran adalah 100 (%).

• Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan perkantoran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Presentase Layanan Perkantoran				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	97,51	100	100	100	100	100

Realisasi Indikator kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100% atau 100% dari target tahunan.

• Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2025

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada tahun 2025 diukur pada akhir tahun sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2026.

• Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi

Indikator kinerja Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan I rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Kegiatan Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026

No	Kegiatan	Permintaan	Terlayani	Persentase
1	Persuratan			
	Nomor surat ttd manual	10	10	100%
2	Rapat Offline	25	25	100%

No	Kegiatan	Permintaan	Terlayani	Persentase
3	Keuangan			
	a. Dokumen SPJ yang diverifikasi	58	58	100%
	b. Dokumen SPJ perdin rampung	58	58	100%
	c. Pengajuan SPM	85	85	100%
	d. Pendaftaran Kontrak (kontrak)	48	48	100%
4	Kepegawaian			
	a. Peremajaan SIASN (pegawai)	6	6	100%
	b. Layanan mutasi (pegawai)			
	• Usulan KGB	7	7	100%
	• Usulan Kenaikan Pangkat	2	2	100%
	c. Cuti (pegawai)	21	21	100%
Jumlah		320	320	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat permintaan layanan perkantoran sebanyak 320 layanan dan telah terealisasi sebanyak 320 layanan, sehingga layanan perkantoran pada TW I di Direktorat Ikan Air Laut sebesar 100%.

Hal ini berdasarkan pada perhitungan persentase layanan perkantoran yang akan menjadi realisasi Indikator kinerja:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Layanan Perkantoran (\%)} &= \frac{320}{320} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Sehingga berdasarkan perhitungan diatas didapatkan nilai persentase layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut sebesar 100%. Realisasi capaian untuk indikator kinerja ini sesuai dengan target pada triwulan I yaitu sebesar 100% dan dalam pelaksanaannya indikator kinerja ini tidak terdapat kendala.

• Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut terhadap indikator kinerja ini adalah mengoptimalkan layanan perkantoran di Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi lebih baik lagi.

IKSK 21. Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis

yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level 1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Indikator Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2026. Target tahunan Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP adalah sebesar 100 (%)

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja persentase penyelesaian penyusunan SOP dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP

Sasaran Kegiatan		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut				
IKSK		Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP				
2025		2026			% Capaian Tahun 2026	
Realisasi		Target		Realisasi		
TW I	Tahun 2025	Tahunan	TW I	TW I	Terhadap Realisasi TW I	Terhadap target tahunan
0	100	100	0	0	0	0

Realisasi Indikator kinerja persentase penyelesaian penyusunan SOP pada triwulan I tahun 2026 belum memiliki capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun.

- **Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2021-2024**

Persentase Penyelesaian Identifikasi SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun 2026 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan nilai capaian kinerja dengan tahun 2025.

- **Hasil Evaluasi dan Kendala Atas Rencana Aksi**

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Penyusunan SOP Satker Direktorat Ikan Air Laut pada Tahun 2026 sudah dalam tahap melakukan penyusunan SOP dan dari proses identifikasi tersebut didapatkan 5 Bidang Kegiatan dimana Direktorat Ikan Air Laut menjadi PIC, bidang kegiatan tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan kawasan budi daya perikanan;
2. Standardisasi bidang kesehatan ikan dan lingkungan budi daya;
3. Pengendalian lingkungan budi daya;
4. Rehabilitasi lingkungan budi Daya;
5. Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Indikator ini belum terdapat capaian karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun, kendala yang ada dalam upaya mencapai target ini adalah koordinasi yang belum optimal antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan masing-masing SOP.

- **Rekomendasi Rencana Aksi dan Tindak Lanjut**

Rekomendasi rencana aksi dan tindak lanjut untuk periode selanjutnya adalah a) melanjutkan proses penyelesaian penyusunan draft SOP yang melibatkan Direktorat Ikan Air Laut dan b) menjalankan tugas PIC di bidang kegiatan yang ditunjuk dalam penyusunan draft SOP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya agar koordinasi antar pemangku kepentingan bisa berjalan lancar.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Direktorat Ikan Air Laut tahun 2026 khususnya Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut adalah sebesar Rp. 403.744.000 dan tidak terdapat pagu blokir, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan adalah sebesar Rp.403.744.000 Realisasi satker Direktorat Ikan Air Laut hingga triwulan I Tahun 2026 khususnya Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut adalah sebesar Rp. 64.186.700 atau sebesar 15.89% dari pagu efektif.

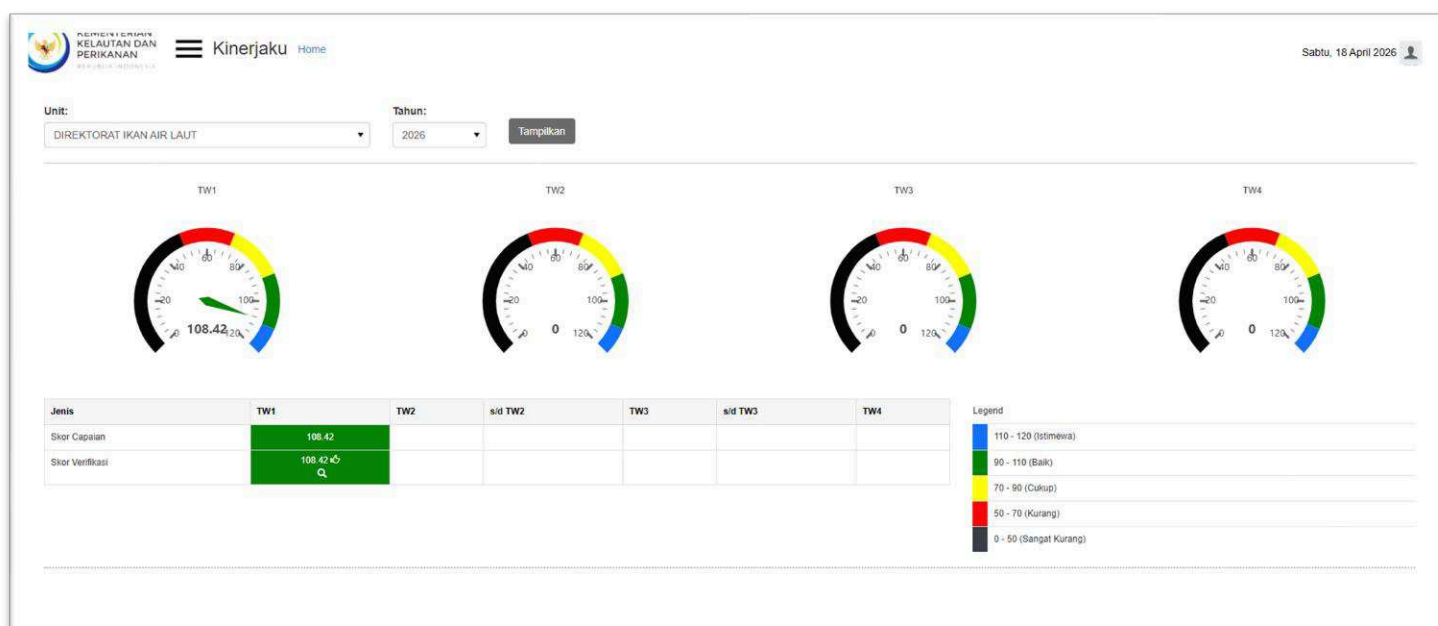
BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Direktorat Ikan Air Laut merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan Ikan Air Laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Laut berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Ikan Air Laut.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode Januari s.d. Maret 2026. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I tahun 2026, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja pendukung sasaran kegiatan, sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja telah melampaui target triwulan yang telah ditetapkan atau >100%, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target triwulan yang telah ditetapkan dan 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya kurang dari target triwulan yang telah ditetapkan atau <100%. Seluruh capaian Indikator kinerja Tahun 2025 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada mencapai nilai **“BAIK”** dengan nilai **108,42**.



Gambar 6. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I Tahun 2026

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Direktorat Ikan Air Laut pada triwulan I tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya ada hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

No.	Hal Yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1.	Koordinasi yang belum optimal antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan masing-masing SOP	Menjalankan tugas PIC di bidang kegiatan yang ditunjuk dalam penyusunan draft SOP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya agar koordinasi antar pemangku kepentingan bisa berjalan lancar.

LAMPIRAN

Kertas Kerja Verifikasi Triwulan I

KERTAS KERJA VERIFIKASI

Unit Kerja : DIREKTORAT IKAN AIR LAUT
Bulan : Maret - 2026
NKO Awal : 108.42
NKO Verifikasi : 108.42

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	IKSK.1	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT Data Dukung1 , Data Dukung2	ekor	Maximize	5.612,00	410,00	530,00	530,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 439/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut di UPT (ekor) Triwulan I Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 dan Nota Dinas Nomor B.803/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 10 April 20264 0/IV/2026 Hal
2	IKSK.10	Kebijakan tata kelola bidang budi daya ikan air laut yang disusun	rekomendasi kebijakan	Maximize	3,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
3	IKSK.11	Sampel monitoring penyakit ikan air laut yang diuji Data Dukung1 , Data Dukung2	Sampel	Maximize	340,00	75,00	113,00	113,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 438/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Laut Yang Diuji (Sampel) Triwulan I Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 dan Nota Dinas Nomor B.803/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 10 April 20264 0/IV/2026 Hal
4	IKSK.12	Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang diuji Data Dukung1 , Data Dukung2	Sampel	Maximize	216,00	53,00	72,00	72,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 437/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Sampel Monitoring Surveillance AMU/AMR yang Diuji (Sampel) pada Triwulan I Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 dan Nota Dinas Nomor B.803/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 10 April 20264 0/IV/2026 Hal
5	IKSK.13	Kawasan Budi Daya Lobster Yang Dibangun atau Direvitalisasi	unit	Maximize	1,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
6	IKSK.14	Unit Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Sertifikasi Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut (CBIB, CPB)	unit	Maximize	200,00	0,00		0,00	Valid	Belum adanya capaian, karena target triwulan I adalah 0

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
7	IKSK.15	Sosialisasi NSPK Bidang Perikanan Budi Daya	orang	Maximize	500,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
8	IKSK.2	Produksi Calon Induk Unggul Kepiting di UPT	ekor	Maximize	5.747,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
9	IKSK.3	Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT Data Dukung1 , Data Dukung2	ekor	Maximize	773.771,00	110.500,00	135.286,00	135.286,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 441/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Produksi Benih Ikan Air Laut di UPT (ekor) Triwulan I Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 dan Nota Dinas Nomor B.803/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 10 April 20264 0/IV/2026 Hal
10	IKSK.4	Produksi Benih Kepiting di UPT	ekor	Maximize	341.622,00	0,00		0,00	Valid	Belum adanya capaian, karena target triwulan I adalah 0
11	IKSK.5	Produksi Ikan Konsumsi Air Laut di UPT	Kg	Maximize	25.000,00	0,00		0,00	Valid	Belum adanya capaian, karena target triwulan I adalah 0
12	IKSK.6	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat Data Dukung1 , Data Dukung2	ekor	Maximize	4.560.469,00	570.000,00	686.500,00	686.500,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 443/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Benih Ikan Air Laut Yang Disalurkan Ke Masyarakat (ekor) Triwulan I Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 dan Nota Dinas Nomor B.803/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 10 April 20264 0/IV/2026 Hal
13	IKSK.7	Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat Data Dukung1 , Data Dukung2	ekor	Maximize	448.658,00	112.164,00	100.000,00	100.000,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 444/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Katimja Induk dan Benih Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat (ekor) Triwulan I Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 dan Nota Dinas Nomor B.803/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 10 April 20264 0/IV/2026 Hal
14	IKSK.8	Sampel ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Data Dukung1 , Data Dukung2	Sampel	Maximize	1.842,00	488,00	667,00	667,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 436/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Ketua Tim Kerja Kesehatan Ikan Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Sampel Ikan Air Laut Yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel) Triwulan I Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 dan Nota Dinas Nomor B.803/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 10 April 20264 0/IV/2026 Hal

No	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Polaritas	Target 2026	Target Maret	Capaian Maret	Capaian Data Dukung	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
15	IKSK.9	Monitoring produksi pakan alami di UPT Data Dukung1 Data Dukung2	laporan	Maximize	4,00	1,00	1,00	1,00	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Nota Dinas Nomor 445/DJPB.4/TU.210/IV/2026 dari Katimja Pakan Hal Laporan Realisasi Capaian Indikator Monitoring Produksi Pakan Alami di UPT Triwulan I Tahun 2026 tanggal 9 April 2026 dan Nota Dinas Nomor B.803/DJPB.4/TU.140/IV/2026 dari Direktur Ikan Air Laut Hal Laporan Realisasi Indikator Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 10 April 20264 0/IV/2026 Hal
16	IKSK.02.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut Data Dukung1	Persen	Maximize	86,00	86,00	88,24	88,24	Valid	Capaian sudah sesuai dengan data dukung Surat Dinas Nomor B.1911/DJPB.1/TU.140/IV/2026 dari Setditjen Perikanan Budi Daya Hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB"Triwulan I Tahun 2026 Tanggal 8 April 20264 0/IV/2026 Hal
17	IKSK.02.2	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Direktorat Ikan Air Laut	Nilai	Maximize	84,20	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
18	IKSK.02.3	Indeks Profesionalitas ASN Satker Direktorat Ikan Air Laut	Indeks	Maximize	81,50	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada semesteran
19	IKSK.02.4	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Ikan Air Laut	Nilai	Maximize	81,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
20	IKSK.02.5	Persentase Layanan Perkantoran	Persen	Maximize	100,00	0,00		0,00	Valid	-
21	IKSK.02.6	Persentase penyelesaian penyusunan SOP	Persen	Maximize	100,00	0,00		0,00	Valid	Belum ada capaiannya, karena pengukuran capaian dilakukan pada akhir tahun
Kesimpulan										